

# Industri Hiburan Saudi Vision 2030: Potensi Konflik Intrareligius Antara Ulama dan Pemerintah Arab Saudi Tahun 2016-2024

Mauludy Nugraha<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jalan RS. Fatmawati Raya, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan 12450

Penulis untuk Korespondensi/E-mail: [2110413116@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2110413116@mahasiswa.upnvj.ac.id)

## Abstract

*This research aims to analyze the reformist changes made by Saudi Arabia with its ambitious megaproject, Saudi Vision 2030. The Saudi Vision aims to change the country's economic dependence on petroleum. Efforts to maintain and implement the Saudi Vision 2030 project have made the Saudi Arabian government eliminate the value and faces that have been inherent in every policy. As a result, Muhammad Bin Salman (MBS) as the pioneer of Saudi Vision 2030 chose to leave the Wahabi clerics and their teaching values. This research method is a qualitative literature study of data collection (books, journals, working papers, and online news) within 2016-2024. The results of this study show that the Saudi Vision 2030 program, one of which is the entertainment industry, contradicts the values and teachings of the Wahabi clerics who have shared roles with the Kingdom of Saudi Arabia. The strategies carried out by MBS is to reduce Wahabi opinions and activities, arresting clerics, asking them not to criticize policies, and changing curricula and policies with more modern ones. The impact of the changes made by MBS is the potential conflict and the lost of emotional ties to Wahabi clerics, and also losing the trust of Islamic Countries.*

**Keyword:** Conflict, Saudi Vision 2030, Library Research, and Clerics Wahhabi

## Abstrak

*Penelitian ini bertujuan menganalisis perubahan secara reformis yang dilakukan Arab Saudi dengan megaprojek ambisius, yaitu Saudi Vision 2030. Saudi Vision bertujuan merubah ketergantungan ekonomi yang selama ini berada pada minyak bumi. Upaya menjaga dan mengimplementasikan proyek Saudi Vision 2030, membuat pemerintah Arab Saudi menghilangkan nilai dan wajah yang selama ini melekat dalam setiap kebijakannya. Alhasil Muhamad Bin Salman (MBS) selaku pelopor Saudi Vision 2030 memilih meninggalkan ulama Wahabi dan nilai ajarannya. Metode penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka (buku, jurnal elektronik, working paper, dan berita online) dalam rentang 2016-2024. Hasil penelitian menunjukkan program Saudi Vision 2030 salah satunya industri hiburan bertentangan dengan nilai dan ajaran ulama Wahabi yang selama ini berbagi peran dengan Kerajaan Arab Saudi. Adapun strategi yang dilakukan MBS adalah meredam pendapat dan aktivitas Wahabi, seperti menangkap ulama, meminta untuk tidak mengkritik kebijakan, dan mengubah kurikulum serta kebijakan dengan yang lebih modern. Hasil dari kebijakan tersebut berimplikasi adanya, potensi konflik dengan ulama Wahabi yang selama ini dekat dengan kerajaan Saudi Arabia. Hal tersebut dapat diperkeruh dengan perlawanan dari keluarga Al Saud yang memiliki ikatan emosional dengan ulama Wahabi, dan kehilangan kepercayaan Negara.*

**Kata kunci:** Konflik, Saudi Vision 2030, Studi Pustaka, dan Ulama Wahabi

## PENDAHULUAN

Perubahan besar dalam sektor sosio-ekonomi dipilih oleh pemerintah Arab Saudi, artinya cetak biru dari Visi 2030 mengarah pada transformasi sosio-ekonomi (Yunai, 2022). Keputusan tersebut dipilih sebagai metode untuk meninggalkan ketergantungan terhadap pengelolaan minyak. Sebagai kebaruan pemerintah Arab Saudi merancang program visioner yang disebut Saudi Vision 2030. Program strategis ini menjadi babak baru sekaligus transformasi kegiatan ekonomi di Arab Saudi. Kegiatan ekonomi Saudi Vision 2030 mendorong lahirnya kebijakan ke arah perubahan yang lebih moderat. Hal ini menjadi langkah baru yang diusung oleh Pangeran Muhammad Bin Salman, sekaligus tantangan dalam menciptakan reformasi ekonomi (Derajat & Kurniawan, 2021).

Tahun 2015, dalam laporannya McKinsey & Company memberikan laporan awal mula proses pencanaan Saudi Vision sekaligus aktivitas ekonomi di Arab Saudi. Berdasarkan laporan tersebut, Kerajaan Arab Saudi melakukan investasi besar-besaran terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Investasi tersebut tidak terlepas dari keuntungan lonjakan harga minyak tahun 2003 sampai 2013, selama satu dekade tersebut terjadi peningkatan kemakmuran di Arab Saudi dan menjadi ekonomi terbesar ke-19 didunia (McKinsey & Company, 2015). Tidak hanya itu, pendapatan rumah tangga meningkat sebesar 75 persen dan 1.7 juta lapangan kerja diciptakan (McKinsey & Company, 2015).

Pertumbuhan ekonomi di Arab Saudi dimanfaatkan Pangeran Muhammad bin Salman sebagai langkah awal dan menjadi modal awal dalam melakukan transformasi ekonomi. Sebagai pencetus Saudi Vision 2030, Muhammad bin Salman memimpin langsung proses kegiatan ekonomi dengan memegang tiga pilar utama. Pertama, *a vibrant society* yang diartikan sebagai perubahan aktivitas ekonomi kini berada ditangan sumber daya manusia, kedua *thriving economy* yang berarti keinginan melepaskan ketergantungan ekonomi dari minyak bumi, kemudian *ambitious nation* atau ambisi negara membuat pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel (Akbar & Rasyidah, 2024). Meskipun minyak bumi menjadi kekuatan ekonomi di Timur Tengah,

tetapi fluktuasi harga minyak tidak menentu sehingga memengaruhi stabilitas ekonomi di Arab Saudi (Adriansah, 2021). Ditambah harga minyak pasca 2014 terus mengalami penurunan, hal ini mendorong Pemerintah Arab Saudi untuk melakukan pembaharuan ekonomi (Hikmah & Abrar, 2019). Pilar selanjutnya adalah *an ambition nation*, aktivitas Saudi Vision 2030 menjadi ambisi penuh pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Tujuannya menciptakan sistem kerajaan yang akuntabel, transparan, dan jelas termasuk dalam memberikan pelayanan terhadap birokrasi (Adriansah, 2021)

Program Saudi Vision 2030 memiliki beberapa visi yang berfokus pada pembangunan ekonomi. Dalam hal ini terdapat 11 *vision realization programs*, dari kesehatan sampai industri hiburan mengalami kebaruan. *Vision realization programs* menjadi elemen penting dalam implementasi Saudi Vision 2030, terutama terhadap *roadmap* dan adaptasi kebutuhan negara dengan tujuan (Safira, 2024). VRPs adalah sebuah elemen penting dalam mengimplementasikan setiap visi dan misi Saudi Vision 2030 yang merupakan sebuah roadmap dengan indikator kerja yang spesifik dan beradaptasi pada kebutuhan negara yang berubah-ubah untuk memastikan setiap tujuan dan sasaran dalam program ini dapat tercapai dengan efektif.

Saudi Vision 2030 memicu perubahan komprehensif, mengantarkan keterbukaan terhadap dunia. Komitmen dalam perkembangan mendorong dan membina ekonomi didalam internal Arab Saudi. Oleh karena itu, tidak heran program yang telah dicanangkan sejak 2016 menciptakan Arab Saudi sebagai negara yang beragam, inovatif, dan menjadi proyek ambisius.

Proyek ambisius ini mendorong Arab Saudi menjadi negara yang terbuka. Dengan membawa fondasi bagi pertumbuhan, menyatukan negara, dan membuat masa depan yang sejahtera. Vision 2030 meningkatkan iklim bisnis, teknologi, dan hiburan sekaligus mengundang investasi. Arab Saudi kini terbuka lebar bagi dunia untuk memulai aktivitas ekonomi, seperti investasi, pariwisata, dan hiburan. Sebagai bentuk memberikan keamanan dan kepastian ekonomi, Arab Saudi terus mengendalikan dan berupaya menghentikan konflik. Hal tersebut dibuktikan dengan

melunaknya Muhammad bin Salman dan cenderung merubah irama politiknya terhadap negara Timur Tengah, seperti Iran dalam aktivitas konflik skala regional (Ali & Rofi, 2021). Dalam hal ini MBS lebih mengedepankan menjaga keberhasilan program-program Vision 2030 (Ali & Rofi, 2021). Keputusan tersebut tidak terlepas dari kerugian akibat aktivitas militer dan peperangan yang secara tidak langsung menghambat program pembangunan dan ekonomi.

Di tengah upaya menjaga prioritas investasi dan ekonomi di Arab Saudi, melihat program yang dicanangkan tidak menutup kemungkinan terjadi gejolak didalam internal Arab Saudi. Pihak yang berpotensi memainkan konflik dengan MBS adalah ulama Arab Saudi yang memegang nilai fundamental dan menolak modernisasi. Ulama tersebut diidentifikasi sebagai Wahabi yang telah lama memegang pengaruh di Arab Saudi. Meskipun MBS tidak secara spesifik memiliki keinginan meninggalkan Wahhabi, tetapi keputusan politik yang dipilih cenderung memilih menghapus ekstrimisme dalam dogma agama puritan (Mas'udi, 2020). Meninjau beberapa keputusan politik yang dipilih dalam bagian Saudi Vision 2030, MBS menginginkan Arab Saudi menjadi negara Islam yang moderat dan menerima semua agama, ras, dan budaya tanpa terkecuali (Mas'udi, 2020). Dibuktikan dengan program Saudi Vision 2030, seperti pembukaan tempat hiburan bioskop, *live music*, dan memberikan kesempatan bagi wanita untuk bekerja dan mengendarai kendaraan.

Dalam memberikan upaya keamanan terhadap program yang dirancang, yaitu Saudi Vision 2030. Desember 2016, Raja Salman mengangkat dua ulama senior yang dianggap lebih moderat, sebagai langkah mendukung liberalisasi sosial (Kinninmont, 2017). Pengangkatan ini menjadi penting sebagai salah satu bentuk memastikan kelompok ulama memberikan dukungan penuh terhadap program Saudi Vision 2030. Hal ini tidak terlepas dari sistem politik dan masyarakat Arab Saudi yang menganggap kehadiran Ulama sebagai bagian penting dalam struktur sosial dan politik. Ditambah ulama dianggap sebagai mitra pemerintah Arab Saudi, yang dipelopori pendiri Kerajaan Saudi pertama (Mohammed bin Saud dengan ulama yang memiliki pengaruh (Mohammed Abdelwahab), yang Namanya

digunakan untuk menyebut "Wahabisme" (Kinninmont, 2017).

Sebelum MBS memegang kendali penuh pemerintahan Arab Saudi, terdapat pembagian yang disusun secara tradisional antara peran kerajaan dan ulama. Kerajaan dalam hal ini bertugas dan memainkan peran utama sebagai penentu keputusan keamanan, hubungan luar negeri, dan sebagian besar ekonomi. Sementara ulama memiliki konsentrasi dalam membangun perhatian terhadap sistem pendidikan, sosial, keluarga, dan peradilan (Kinninmont, 2017). Dengan pembagian tersebut keduanya berbagi peran dan memiliki status sosial dan posisi yang strategis sekaligus terhormat.

Sementara itu dengan program Saudi Vision 2030 yang telah berjalan hampir satu dekade, dalam beberapa catatan peran Ulama khususnya Wahabi mulai dihilangkan. Meskipun tidak secara terang-terangan, tetapi dalam beberapa program yang dicanangkan, dapat dipastikan berbenturan dengan nilai yang biasa dipegang oleh Ulama yang berasal dari Wahabisme.

Dalam nilai dan ajaran Wahabi, kelompok atau klan tersebut memegang ajaran pemurnian Islam. Prinsip dan cita-cita memurnikan ajaran Islam menjadi narasi yang diutarakan kelompok yang dianggap sebagai wajah Arab Saudi tersebut. Dalam hal ini Wahabi menentang keras bentuk tindakan yang bersifat kurafat, sufistik, dan bid'ah (Wafi, 2018). Oleh karena itu, kelompok mereka dikenal sebagai pihak yang memandang agama secara kaku dan konservatif. Dalam arti lain sulit menerima hal baru dan tidak menoleransi segala bentuk yang dianggap berbenturan dengan nilai Islam.

Berdasarkan argumentasi diatas terdapat diskursus sekaligus pertentangan antara pemerintah Arab Saudi yang sedang melakukan program Saudi Vision 2030 dengan nilai Wahabi yang selama ini melekat. Disisi lain hubungan Wahabi dan Kerajaan Arab Saudi selama ini cenderung saling membutuhkan. Tidak hanya itu, dengan kehadiran kelompok Wahabi secara tidak langsung membantu otoritas Kerajaan Arab Saudi didepan masyarakat. Bahkan, dengan ditetapkannya Arab Saudi sebagai negara yang diakui tahun 1932, nilai dan ajaran Wahabi ikut dideklarasikan sebagai bagian penting dalam negara sekaligus ideologi negara (Wafi, 2018).

Penelitian serupa pernah ditulis oleh Mahmud Hibatul Wafi tahun 2018 dengan judul penelitian “Diskursus Reformasi Arab Saudi: Kontestasi Kerajaan Saudi dan Wahabi”, dalam penelitian ini Wafi menguraikan asumsi diskursif dalam memahami pendekatan *decision making process* untuk melihat sejauh mana cita-cita reformasi Arab Saudi. Ditambah Wafi menganalisis reaksi kubu Wahabi dalam menerima kebijakan tersebut. Selanjutnya penelitian serupa pernah ditulis oleh Anna Zakiah Derajat dan Toni Kurniawan tahun 2021 dengan judul penelitian “Saudi Vision 2030 dan Kebijakan Reformasi Pada Kerajaan Arab Saudi”, dalam penelitian ini kedua penulis membahas seputar problematika Saudi Vision 2030 yang berkaitan dengan Wahabi yang dilihat dalam skala mikro dan pertentangan nilai dengan reformasi kebijakan tersebut (Derajat & Kurniawan, 2021).

Dua penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan memiliki fokus penelitian yang sama, yaitu Saudi Vision 2030 dan Ulama Wahabi. Namun, perbedaan yang penulis bawa dalam penelitian ini terletak pada mencoba menganalisis lebih jauh potensi konflik yang terjadi selama tahun 2016-2024. Selain itu, penulis mencoba menganalisis upaya dan langkah politik yang dipilih MBS dalam meredam konflik dengan Ulama yang notabenehnya menjadi bagian dari Wahabisme.

Penelitian ini bertujuan menganalisis potensi konflik yang terjadi antara kelompok Wahabi dengan pemerintah Arab Saudi khususnya Muhammad Bin Salman selama tahun 2016-2024. Penelitian ini menarik sebab keterbukaan Arab Saudi khususnya dalam industri hiburan sejak 2016 membawa perubahan dan transformasi yang sangat signifikan. Selain itu, untuk mengetahui lebih jauh dalam penelitian ini terdapat analisis sejauh mana upaya Muhammad Bin Salman menghilangkan peran sekaligus pengaruh kelompok Wahabi di lingkungan Kerajaan?

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang dapat diartikan sebagai proses penelitian yang tidak memiliki pola, bersifat seni, dan menampilkan interpretasi dari data yang ditemukan dilapangan (Sugiyono, 2013).

Sementara itu teknik pengumpulan data yang digunakan adalah *library research*, yang berarti penulis memanfaatkan kekayaan literatur dan tidak turunlapangan. Dalam hal ini penulis menggunakan objek penelitian Saudi Vision 2030, sementara jenis penelitian ini adalah kualitatif deskripsi atau penulis hanya menjelaskan dan menjabarkan, kemudian dianalisis dengan komprehensif. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan data sekunder atau studi pustaka, seperti buku, jurnal, working paper, dan berita *online*. Adapun teknik analisis yang digunakan penulis, terbagi menjadi beberapa tahap pertama menyiapkan data mentah dan memindai data yang penting, seperti mengumpulkan di *google drive*, kemudian selama proses mengumpulkan data penulis dibantu dengan software *Publish or Perish*, kemudian membaca semua data. Selanjutnya melakukan *coding data* dengan mengatur materi menjadi indikator untuk disajikan dengan menggunakan pengambilan data, seperti teks, gambar, dan label kategori. Kemudian, mengembangkan deskripsi dan tema dengan narasi kualitatif, dan melakukan interpretasi data. Dengan hal ini selama proses analisis data disiapkan dan dipindahkan atau disortir, sehingga dapat diinterpretasikan lebih besar (Creswell, 2007). Adapun studi kepustakaan dapat diartikan sebagai kajian teoritis dan referensi lain termasuk dalam nilai, budaya, dan norma yang berkembang menyesuaikan masalah sosial yang diteliti (Sugiyono, 2013).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Program Saudi Vision Bertentangan Dengan Nilai dan Ajaran Ulama Wahabi

Rancangan program Saudi Vision 2030 dinilai sebagai babak baru modernisasi di Arab Saudi. Arab Saudi secara berangsur-angsur mengalami perubahan dan memiliki nuansa gemar melakukan pembangunan infrastruktur mewarnai selama lima tahun terakhir. Masyarakat Arab Saudi yang dikenal konservatif, kini berkembang adaptif terhadap pelaksanaan reformasi ekonomi dan sosial termasuk yang mengarah sistem liberal (Hidayat et al., 2022).

Dalam rangka mendukung program Saudi Vision 2030, Kerajaan Arab Saudi mendorong Program Transformasi Nasional atau *National*

*Transformation Program* (NTP), ditandai dengan mengubah ekonomi berbasis pengetahuan, pusat kewirausahaan dan inovasi, dan pemimpin digital global (Saeed Al-Amri, 2024). Dimulai dari digitalisasi layanan pemerintah dengan tujuan menghemat waktu dan tenaga, promosi sektor swasta dalam lingkup inklusif, dan menciptakan negara sebagai bagian instrumen yang inovatif. Selain itu, Arab Saudi mengembangkan *Fiscal Balance Programm* (FBP) dan menjadi salah satu kunci realisasi Saudi Vision 2030, sekaligus sebagai bagian bagian menciptakan lembaga pengawasan yang kredibel dan mendukung efisiensi dalam rancangan fiskal (Hasanov & Shannak, 2020). Dengan demikian, Arab Saudi menggabungkan reformasi administratif dan praktik untuk manajemen keuangan, seperti pengenalan kerangka anggaran (Moshashai et al., 2018). Dengan arti lain, keterbukaan perihal rancangan anggaran menjadi salah satu perubahan yang dilakukan selama program Vision 2030 ini.

Dibalik perubahan dalam sektor ekonomi yang dilakukan secara cepat, hal yang mendapatkan perhatian dari kelompok Ulama di Arab Saudi adalah industri hiburan. Berdasarkan beberapa catatan terdapat banyak pertentangan yang terjadi dalam program Vision 2030, mulai dari peran wanita hingga penerimaan wisatawan. Terlepas dari hal tersebut, Industri hiburan menjadi atensi dunia sekaligus sektor yang bertentangan dengan nilai Wahabisme. Meskipun alasan utama perkembangan dan pembangunan industri hiburan karena meningkatkan ekonomi negara.

Aktivitas seperti Saudi Idol muncul pertama kali tahun 2023 dengan menampilkan perempuan sebagai peserta audisi. Hiburan yang terkemuka di beberapa negara didunia, kini telah diadopsi oleh Kerajaan Arab Saudi.



Gambar 1. Poster Saudi Idol 2022.  
Sumber: CNN Indonesia.

Selain aktivitas musik, industri hiburan di Arab Saudi kini telah terdapat diskotik dan bioskop. Keinginan memanfaatkan sektor hiburan sebagai tulang punggung ekonomi tidak terlepas dari Arab Saudi sebagai pusat kemajuan dan peradaban umat Islam dunia. Bahkan, dalam dua tahun terakhir Arab Saudi menjadi pusat perhatian dunia khususnya dalam industri hiburan. Hal tersebut dibuktikan dengan mendatangkan pesepakbola ternama dan megabintang Cristiano Ronaldo untuk bermain di Liga Saudi Arabia. Keputusan tersebut tidak dapat dipungkiri berdampak pada industri hiburan.



Gambar 2. Perkenalan Cristiano Ronaldo di Al-Nassr Arab Saudi.

Sumber: Pinter Politik.

Kepindahan Megabintang pesepakbola (Cristiano Ronaldo) mendorong atlet sepak bola lain untuk mengikuti jejaknya. Fenomena ini mirip dengan Qatar sekitar tahun 2016, kemudian diproyeksikan sebagai Tuan Rumah Piala Dunia. Hal tersebut dibuktikan dengan pemilihan Arab Saudi sebagai Tuan Rumah Piala Dunia tahun 2034. Tepatnya empat tahun setelah program ambisius ini selesai. Lebih dari sebagai dukungan melaksanakan hiburan Sepak Bola, kepindahan Ronaldo dinilai menjadi keuntungan bagi Arab Saudi termasuk dalam melakukan transformasi ekonomi negara, dengan arti lain Ronaldo membantu Arab Saudi mengubah misinya lebih cepat (Pinter Politik, 2023).

Selain dari aktivitas industri hiburan di atas, Saudi Vision 2030 pun merancang beberapa kegiatan pariwisata. Adapun rinciannya dituliskan pada tabel 1:

Tabel 1. Key Project Tourism and Heritage

No	Nama Project	Keterangan
1.	The Red Sea	2023 sudah dibuka, tahun 2030 berencana menyelesaikan 8000 kamar di Hotel, dan 1.000 properti Hunian.

No	Nama Project	Keterangan
2.	Diriyah	Dirancang untuk menjadi bangunan bersejarah yang berkelanjutan, Diriyah menghadirkan inisiatif yang berfokus pada konservasi air, efisiensi energi, kesehatan, pelestarian budaya dan warisan, serta ketahanan.
3.	Amaala	destinasi wisata mewah yang tengah dikembangkan di sepanjang pantai Laut Merah di wilayah barat laut Arab Saudi. Dengan luas 4.000 km <sup>2</sup> .
4.	Mohammed bin Salman Project For Developing Historic Mosque	Proyek Mohammed bin Salman untuk Pengembangan Masjid Bersejarah menghormati keindahan dan kekayaan sejarah warisan Islam Arab Saudi.
5.	Jeddah Central Project	Dirancang untuk melestarikan warisan budaya Jeddah yang kaya sambil merangkul modernitas. Menampilkan empat landmark terkenal (Gedung Opera, Museum, Stadion Olahraga, dan Oseanarium),
6.	Soudah Development	Soudah adalah destinasi pegunungan mewah 3015 meter di atas permukaan laut di wilayah Aseer Arab Saudi.
7.	AiUla	Museum hidup berupa bongkahan batu pasir, perkembangan bersejarah, dan makam yang dilestarikan
8.	The Rig	Wisata petualangan, menawarkan pengalaman luar biasa di destinasi unik di jantung Teluk Arab.
9.	Trojena	Tempat di mana alam, arsitektur, dan teknologi bersatu untuk menawarkan pengalaman kelas dunia dan menjadi tuan rumah festival dan acara unik, seperti Asian Winter Games 2029
10.	Sindalah	Pulau mewah di mana keindahan alam berpadu dengan desain berkelanjutan, teknologi canggih, dan arsitektur menawan.
11.	Desert Rock	Penghormatan kepada pariwisata berkelanjutan dan perpaduan sempurna antara kemewahan modern dan pelestarian lingkungan.
12.	Boutique Group	Perusahaan perhotelan
13.	Rua Almadinah	Mengembangkan ekosistem perhotelan dan ritel yang komprehensif dan meningkatkan layanan yang diberikan kepada para peziarah dan pengunjung.

No	Nama Project	Keterangan
14	Masjid Quba	Memiliki target untuk peziarah yang datang ke Arab Saudi.
15.	Coral Bloom	Hiburan di sekitara Pantai.
16.	Soudah Speaks	Dirancang untuk mencerminkan gaya arsitektur tradisional setempat dan akan mempromosikan warisan budaya dan lanskap wilayah tersebut.
17.	Alwadi	AlWadi mencakup 5 distrik karakter yang berbeda dengan aset tepi laut.
18.	Royal Arts Complex	Kompleks Seni Kerajaan diharapkan menjadi salah satu landmark paling menonjol di Taman Raja Salman.
19.	New Abha Airport Project	Bandara
20.	Jeddah Historic District	Menargetkan wisatawan peziarah dan internasional.

Sumber: Saudi Vision 2030.

Berdasarkan data didalam tabel 1 tersebut, target *tourism and heritage* melahirkan perkembangan industri hiburan lain sebagai pendukung. Hal tersebut disebabkan untuk memberikan pelayanan kepada wisatawan mancanegara, maka pelayanan seperti hiburan menjadi salah satu yang tidak dapat dipisahkan.

Kembali kepada nilai dan ajaran Wahabi, aktivitas tersebut tidak dapat dipungkiri berbenturan dengan ideologi Wahabi yang melekat selama ini dalam tubuh masyarakat Arab Saudi. Argumentasi tersebut beralasan pada tidak terlepasnya dari aktivitas industri hiburan yang dianggap sebagai ancaman bagi nilai Wahabisme. Sebagai contoh kehadiran sektor hiburan yang merangkap dalam lingkup pariwisata memperlihatkan kehadiran perempuan dalam kehidupan publik (Alhussein, 2022). Dengan tampil kedepan publik secara langsung perempuan mendapatkan kesempatan yang sama dengan laki-laki. Hal ini mendorong pemerintah Arab Saudi dalam posisi dilemma antara memanfaatkan perempuan sebagai cara mengatasi kemiskinan atau berpegang teguh dengan nilai Wahabi yang telah disepakati sejak berdirinya Negara Arab Saudi. Dapat dibuktikan dengan pengangguran yang tinggi dikalangan perempuan tujuh kali lipat dibandingkan kalangan laki-laki (Alsayad, 2017). Namun, dari beberapa program Vision 2030, pemerintah Arab Saudi lebih mempertimbangkan perkembangan ekonomi, sehingga perempuan mendapatkan kesempatan tampil didepan publik.

Disisi lain aktivitas rutin perihal kebudayaan menghasilkan diversifikasi ekonomi dan memberikan peluang memunculkan kekuatan lunak (Alhussein, 2022). Kekuatan tersebut dapat berasal dari kelompok manapun, tidak hanya dari kelompok Wahabi, tetapi bisa berasal dari kelompok yang mendukung program hiburan tersebut. Maka potensi konflik antara kelompok agama semakin nyata.

Sementara itu menilik lebih jauh nilai yang berbenturan dengan industri hiburan terletak dari dampak yang ditimbulkan ketika hal tersebut muncul. Sebagai contoh aktivitas seperti musik, diskotik, dan bioskop menjadi contoh yang dianggap bertentangan dengan pemurnian Islam. Dengan demikian, implementasi Saudi Vision 2030 menghadapi tantangan, termasuk dalam praktik budaya, hak asasi manusia, kebebasan, intoleransi, dan ekstremisme (Latifah & Solihat, 2024).

Industri hiburan dalam Saudi Vision 2030, secara langsung menghendaki perpindahan tangan pengaruh dari Wahabi menjadi moderat. Arab Saudi yang lebih terbuka dan menuntut menerima semua kalangan memberikan nilai yang bertentangan, ditambah reformasi yang dilakukan MBS tidak hanya dalam bentuk infrastruktur dan hiburan, tetapi hal seperti pendidikan menjadi pilihan sebagai bagian membangun fundamental. MBS melakukan sterilisasi ideologi dan paham yang mengarah pada radikalisme, termasuk dalam beberapa aktivitas penarikan edaran buku, kurikulum, dan konten yang memiliki nuansa penuh kebencian dan etnosentrisme (Alexander, 2023).

Keinginan menghilangkan nilai dan ajaran Wahabi dalam menampilkan Arab Saudi yang modern berdampak pada posisi strategis dan sistem sosial yang dulu kental dengan Wahabi pelan-pelan telah mengalami perubahan. Hal ini disebabkan Arab Saudi dikenal dengan citra negatif karena hubungan emosional dengan Wahhabisme, yang dinilai memiliki ideologi kekerasan dan mengarah pada radikalisme (Anwar, 2016).

**Strategi Meredam Pengaruh Ulama Wahabi**  
Proyek ambisius Saudi Vision 2030 mendapatkan respon dari ulama Wahabi sebagai bagian yang mengancam nilai kemurnian Islam. Strategi dan siasat dilakukan Muhammad bin

Salman sebagai bagian mengamankan proyek Saudi Vision 2030.

Strategi pertama yang dilakukan pemerintah Arab Saudi adalah menangkap ulama Wahabi yang kritis dan keras, bahkan menangkap siapapun yang dianggap teroris dan mendukung aktivitasnya (Hasanov & Shannak, 2020). Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk membendung pengaruh, sehingga ketika mereka (Ulama Wahabi) ditangkap, maka aktivitas proses penanaman nilai seputar Wahabisme akan terhambat. Puluhan ulama, jurnalis, dan akademisi ditangkap sepanjang tahun 2017, dan ditahun berikutnya sebanyak 5.000 ulama dipanggil dan dipaksa untuk berjanji agar tidak mengkritisi pemerintah Arab Saudi (Zulifan, 2024).

Keputusan membungkam ulama dan pihak yang berpengaruh menjadi senjata utama Muhammad bin Salman untuk menekan stabilitas politik dalam negeri. Kentalnya dan pengkultusan terhadap ulama di Arab Saudi, menjadi salah satu alasan penangkapan dan pembungkaman dilakukan. Hanya dalam beberapa tahun sejak ambisi mengubah kultural Arab Saudi menjadi Islam Moderat, otoritas negara di bawah pemerintahan MBS menangkap ulama dengan kuantitas yang terus meningkat, khususnya terhadap penceramah yang mempromosikan ekstremisme dan mengganggu stabilitas Arab Saudi (Ismail, 2023). Tercatat beberapa ulama yang ditangkap pemerintah Arab Saudi, Adapun datanya dalam tabel 2:

Tabel 2. Ulama Yang Ditangkap MBS

No	Nama Ulama	Keterangan
1.	Sheikh Abdullah Basar	Belum diketahui penyebabnya.
2.	Sheikh Saud Al Funaisan	Maret 2020. Diduga menyebarkan tindakan ekstremisme.
3.	Saleh al Talib	Agustus 2018. Dalam proses penyebaran ajaran Islam dinilai mengkritik kebijakan kerajaan.
4.	Sheikh Salman Al Awda	Ditangkap September 2017. Mengunggah pendapatnya dalam rekonsiliasi Arab Saudi dan Qatar di platform Media Sosial.
5.	Sheikh Abdullah Basfar	Ditangkap tahun 2022. Alasan menjadi Imam di Masjid Hagia Sophia Turkey tahun 2014.

No	Nama Ulama	Keterangan
6.	Sheikh Badr Al-Meshari	2023
7.	Salman Al-Quda	2017
8.	Awad Al Qarni	2017
9.	Ali Al-Omari	2017
10.	Nasser Al Omar	2018
11.	Safar al-Hawali	2018

Sumber: Data dikelola dari Media Massa.

Data didalam tabel 2, menunjukkan Arab Saudi menginginkan negaranya terbebas dari paham ekstremisme. Berdasarkan tabel 2, artinya tidak menutup kemungkinan masih ada penangkapan lain, hal ini disebabkan Arab Saudi termasuk negara yang tertutup dalam penyebaran informasi. Mereka yang ditangkap MBS mayoritas disebabkan seruan dan pendapat terhadap reformasi politik dan konservatisme mereka termasuk upaya memberikan saran dan nasihat kepada Putra Mahkota Arab Saudi tersebut (Ismail, 2023). Oleh karena itu, di samping perubahan yang dilakukan Pemerintah Arab Saudi dalam menghilangkan ketergantungan terhadap minyak bumi. Kini Arab Saudi muncul menjadi negara yang sering melakukan penangkapan terhadap aktor yang kritis terhadap kebijakan. Dalam hal ini setiap kritik yang muncul akan ditanggapi oleh tindakan represif dan penangkapan telah menjadi norma bagi para ulama yang menentang kebijakan kerajaan (Ismail, 2023). Bahkan, Muhammad bin Nayef selaku Mantan Putra Mahkota ditangkap tahun 2020, diduga akibat dugaan makar.

Selain melakukan penangkapan terhadap ulama yang memiliki latarbelakang eksterisme. Muhammad Bin Salman mulai menghapus ajaran Wahabi dalam kebijakan politiknya. Imbasnya ketika kebijakan berbenturan dengan nilai dan pemahaman Wahabi maka posisi ulama yang memiliki latarbelakang tersebut cenderung semakin jauh dari kekuasaan pemerintahan Kerajaan Arab Saudi. Tujuannya adalah mengambil restrukturisasi basis kekuatannya, lalu mengambil langkah untuk mengendalikan peran ulama dan elit bisnis tradisional (Huyette, 2019).

Perubahan pertama yang berbenturan dengan nilai Wahabi adalah memberikan kesempatan dan hak yang sama terhadap wanita. Sebelumnya perempuan telah didomestifikasi dan menganggap suara wanita adalah hal yang dilarang dan disebut “aurat”. Namun, sejak 2018

peraturan tersebut telah dihapuskan. Kini wanita diperbolehkan tampil didepan publik termasuk dalam mengemudi dan membuka Jilbab (kain penutup untuk wanita).

Sejak Juni 2018, perempuan dapat mengemudi sekaligus mengakhiri larangan *de facto* yang dianggap unik dilakukan didunia (Huyette, 2019). Keputusan ini berbenturan dengan nilai dan pegangan ulama yang memegang paham Wahabi. Melihat dari komentar sebelumnya tahun 2016, ulama senior Mufti Sheikh Abdul Aziz Al Seikh, mengutarakan pendapatnya melalui satelit agama Al Majd, bahwa laki-laki “berjiwa lemah” yang “terobsesi perempuan” bisa merugikan perempuan pengemudi dan anggota keluarga tidak akan mengetahui keberadaan perempuan (Voa Indonesia, 2016). Tidak hanya itu, kini kerajaan telah mengumumkan bahwa perempuan tidak lagi memerlukan izin dari “wali”, yaitu laki-laki untuk mengakses dan melakukan aktivitas dalam layanan pemerintah (Huyette, 2019). Kebijakan selanjutnya yang berbenturan dengan ajaran Islam Wahhabisme adalah pembukaan bioskop. Sebelum MBS berkuasa di Kerajaan Arab Saudi, Kerajaan melarang keberadaan Bioskop. Namun, atas inisiasi MBS bioskop kini sudah mulai beroperasi di Arab Saudi, meskipun pada tahun 2018 Mufti Agung (otoritas keagamaan paling senior) menyatakan bioskop dapat menyebabkan amorilitas (Huyette, 2019). Mulai sejak pembukaan bioskop, kini Industri film di Arab Saudi sedang berkembang pesat. Nama gedung bioskop pun dinamai tokoh terkenal, seperti Muhammad Ali (Folet, 2025). Keputusan membuka bioskop tidak terlepas dari inisiatif pemerintah Kerajaan Arab Saudi dalam membuka industri “*tourism & heritage*”, maka yang bioskop dapat membantu menopang wisatawan dan meningkatkan ekonomi Arab Saudi.

Strategi selanjutnya yang dilakukan MBS untuk meredam pengaruh ulama Wahabi adalah merangkul ulama yang condong terhadap pemikiran moderat. Sebagai negara muslim dan pusat peradaban Islam didunia, Arab Saudi tidak ingin kehilangan jati dirinya sebagai negara Islam. Oleh karena itu, hal yang dilakukan bukan menghapuskan ulama dalam beberapa posisi penting dan kedekatannya selama proses pembuatan kebijakan.

Merangkul ulama yang moderat bertujuan menekankan kepercayaan masyarakat Arab Saudi terhadap otoritas MBS, mengingat ulama menjadi satuan terpenting dalam internal pemerintah Arab Saudi. Dengan demikian, untuk menjaga stabilitas negara dan memberikan keutuhan terhadap keberlanjutan program Saudi Vision 2030 khususnya dalam industri hiburan yang selama ini dianggap tabu di Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi melakukan konsolidasi terhadap ulama yang mendukung dan menolak program ambisius tersebut. Tidak heran selama MBS berkuasa, hanya ulama loyalis MBS yang mendapatkan tempat strategis dan terpendang di Arab Saudi.

Berdasarkan ketiga strategi MBS dalam menghentikan pengaruh ulama Wahabi, pemerintah Kerajaan Arab Saudi tidak hanya menghentikan aktivitas ulama yang kritis terhadap kebijakan yang banyak berasal dari kelompok Wahabisme. Namun, keinginan meninggalkan nilai Wahabi tidak hanya menghapus peran dan menangkap ulama Wahabi. Lebih jauh dari itu, pemerintah Kerajaan Arab Saudi ingin masyarakat mulai beradaptasi dengan kebaruan dan modernisasi yang diciptakan. Perempuan yang sebelumnya didomestifikasi dan Industri hiburan yang sebelumnya dilarang, kini mulai dirubah. Masyarakat Arab Saudi memulai babak baru sebagai masyarakat modern. Dengan demikian, MBS tidak hanya ingin mematikan aktivitas ulama Wahabi, tetapi nilai dan ajaran yang tertanam dimasyarakat ingin dijauhkan, artinya nilai fundamental yang telah lama terdoktrinasi dimasyarakat ingin dihancurkan dan diganti dengan situasi yang lebih lunak (*soft*) dan *non-ekstrisme*. Ditambah MBS melakukan hal tersebut didukung oleh ulama moderat dan ulama yang loyalis terhadap dirinya.

### **Dampak Menghilangkan Pengaruh Ulama Wahabi Di Arab Saudi**

Upaya menghilangkan peran strategis dan pengaruh paham Wahabi dilakukan MBS sebagai bagian menjaga stabilitas politik internal. Namun, untuk menghindari gejolak dan protes masyarakat Arab Saudi, MBS tidak melakukan penghilangan secara radikal. Ia memilih jalan bertahap, dimulai dari konsolidasi dengan loyalis, mengganti sistem kurikulum pendidikan, dan baru memasukan kedalam

penjara ketika dianggap sebagai ancaman bagi otoritas MBS.

Keputusan MBS cenderung banyak diapresiasi oleh pemerintahan Negara Barat, bahkan oleh media barat MBS dikenal dengan sebut "*Mr Everything*" (Haryadi, 2018). Penyebabnya adalah perubahan yang berani dan perannya di regional Timur Tengah penting, terutama terhadap modernisasi. Hal ini disebabkan keberanian untuk melakukan perubahan secara radikal dan menampilkan representasi negara Timur Tengah yang lunak. Hal tersebut disebabkan MBS lebih memprioritaskan gagasan untuk mengamankan proyek Saudi Vision 2030, mengingat untuk mendapatkan investor, kondisi negara mesti stabil dan aman dari ancaman dalam dan luar.

Stabilitas politik luar dan dalam adalah jaminan untuk mengundang investor dan wisatawan internasional mengunjungi Arab Saudi. Hal ini sesuai dengan tiga konsep terkait stabilitas politik, dimulai dari *durability* yang diartikan sebagai "*...possesses a high degree of political trust and cooperative behavior among its citizens*". Lalu pentingnya memiliki *balance*, artinya "*...low short-run variability*". Kedua konsep tersebut saling berkaitan, terakhir pentingnya *immunity* yang berarti masyarakat yang tertata dengan baik dan menolak destabilisasi yang disebabkan agen yang tidak patuh didalam atau masuk dalam sistem (Vallier, 2017).

Muhammad bin Salman dalam hal ini memastikan ketiga konsep tersebut berada ditangan pemerintahannya. *Durability* yang dapat dihubungkan dengan narasi MBS berdalih dibalik proyek megah dan ambisius selalu berada dalam naungan kepentingan ekonomi dan mengurangi pengangguran di Arab Saudi. Bahkan, Kerajaan Arab Saudi kini memperbolehkan wanita untuk bekerja, dengan alasan ekonomi, lambat laun keputusan tersebut dapat diterima masyarakat Arab Saudi. Reformasi ini menunjukkan kemajuan dan perubahan modernisasi untuk komitmen Arab Saudi pada kesetaraan gender (Ardena, 2024).

Dalam hal keseimbangan (*balance*), pemerintah Arab Saudi tidak langsung menghapus kelompok esktremis di Arab Saudi, tetapi membunuh secara pelan-pelan hingga kebawah titik fundamental kelompok tersebut, yaitu

pendidikan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi konflik internal. Ditambah pemerintah Kerajaan Arab Saudi cenderung menutup diri terhadap berita dan jurnalis internasional, sehingga negara dunia sulit mengetahui ulama dan penceramah yang mendapatkan intimidasi dan mendapatkan ancaman karena perbedaan pendapat. Sementara itu dalam hal kekebalan atau *immunity*, Pemerintah Kerajaan Arab Saudi memaksa membungkam kelompok ulama yang kritis dengan menangkap dan menangkap pihak yang dianggap makar, termasuk mantan Putra Mahkota (MBN). Ulama yang ditangkap kemudian dikirim ke penjara dengan catatan memiliki masalah dengan kampanye yang dibangun MBS, terutama terhadap reformasi dan moderasi agama (Zulifan, 2024).

Dibalik memastikan kekuatan internal dan menjamin stabilitas diluar, dampak akibat keputusan MBS menjadi salah satu hal yang titik balik dan *boomerang* tersendiri bagi kerajaan Arab Saudi. Pertama konflik antara MBS dengan ulama Wahabi dapat semakin nyata, meskipun konflik ini sudah terjadi dengan penangkapan ulama Wahabi. Namun, eskalasi konflik lebih besar dapat berpotensi. Dalam hal ini ketika masyarakat Arab Saudi sudah mulai mengakses internet, ditambah ulama yang berlatarbelakang Wahabi melakukan ceramah di media sosial. Meskipun hal ini belum terjadi, tetapi dalam beberapa catatan terdapat ulama yang kritis dan menyampaikan pendapat di media sosial mendapatkan ancaman bahkan penangkapan.

Kedua, peristiwa penangkapan Mantan Putra Mahkota, Muhammad bin Nayef atau MBN menjadi senjata dan ancaman bagi MBS. Sebagai Mantan Putra Mahkota, MBN memiliki loyalis dan dekat dengan ulama Wahabi. Dengan hal ini bukan tidak mungkin MBN dengan berkolaborasi dengan ulama Wahabi mengganggu stabilitas politik MBS. Meskipun sulit dilakukan, tetapi hal ini dapat terjadi ketika kenaikan Raja Salman mundur dan digantikan oleh putranya sekaligus pelopor Saudi Vision 2030. Stenslie dalam penelitiannya "*The End of Elity Unity and the Stability of Saudi Arabia*" menyebutkan situasi yang seharusnya menjadi perhatian bagi mereka yang menggambarkan Putra Mahkota, Muhammad bin Salman sebagai reformis sejati. Meskipun tidak dapat diprediksi keruntuhan Dinasti Saud dalam waktu dekat, tetapi dengan naiknya MBS, maka kerajaan

tersebut menjadi jauh lebih tidak stabil dan tidak dapat diprediksi (Stenslie, 2018). Selain berasal dari pihak Muhammad bin Nayef dan loyalisnya, konflik pun dapat dimulai dengan keluarga Dinasti Saud. Sebagai contoh anggota keluarga kerajaan yang merupakan cucu dari pendiri kerajaan (Ibn Saud) pernah mengedarkan serangkaian surat terbuka.

Laporan di atas berisikan rasa khawatir kerajaan runtuh ketika Raja Salman dan Putranya (Muhammad bin Salman) tidak segera digulingkan, mengingat Raja tidak dalam kondisi yang stabil dan pada kenyataannya MBS yang memerintah kerajaan (Stenslie, 2018). Selain itu, ketidaknyamanan anggota keluarga kerajaan disebabkan oleh pengangkatan MBS sebagai Putra Mahkota cenderung cepat dan tidak terduga, sehingga menimbulkan respon negatif sesama garis keturunan Al Saud selaku pendiri Kerajaan Arab Saudi. Dalam hal ini perlu diketahui, ketika anggota keluarga kerajaan berkonflik, hal ini pun mendorong konflik antara ulama dan kerajaan Arab Saudi. Alasannya terdapat pada biasanya mereka (anggota keluarga) memiliki kedekatan dengan setiap ulama sekaligus menjadi loyalis. Pola tersebut telah mengakar, dibuktikan sejak Al Saud mendirikan Kerajaan Arab Saudi 1932, dirinya menggandeng Muhammad Abdul Wahab selaku ulama saat itu dan berbagi peran penting dalam sektor krusial dimasyarakat.

Ketiga, potensi konflik antara ulama dengan pemerintah Arab Saudi dapat memunculkan spekulasi MBS kehilangan kepercayaan dari negara muslim. Tidak dapat dipungkiri pengikut dan ajaran Wahabi yang berarti kelompok salaf banyak diadopsi di Timur Tengah. Lebih dari itu, mereka telah bertransformasi hingga ke Indonesia. Dengan ketegangan dan hilangnya kedekatan MBS dengan ulama Wahabi, maka bukan tidak mungkin Arab Saudi kehilangan kehormatan di Timur Tengah dan negara Islam.

Di Negara Timur Tengah, ulama biasanya menjadi salah satu faktor kunci stabilitas negara. Maka potensi kehilangan kepercayaan dari negara Islam yang memiliki kedekatan dengan Ulama Wahabi menjadi ancaman dan dampak dari setiap tindakan politik kerajaan Arab Saudi. Ditambah ketika Arab Saudi berubah menjadi *soft* didepan Negara Barat dengan alasan mengamankan dan menarik investasi Saudi Vision 2030. Dengan demikian, hal ini memiliki

peristiwa potensial yang dapat berubah menjadi nyata. Meskipun dinamika yang terjadi kedepan dapat berubah dan dinamis, tetapi segala macam bentuk dan ancaman yang berasal dari potensi konflik antara Ulama dan Kerajaan Arab Saudi menjadi fenomena titik balik kehancuran negara. Situasi ini dipilih untuk melancarkan proses modernisasi Arab Saudi, mengingat nilai-nilai Ulama Wahabi yang dianggap cukup konservatif dan feodalisme. Alasannya sebab feodalisme dalam lingkup kehidupan modern dapat menghambat proses kemajuan dan perkembangan berkelanjutan, khususnya dalam keterbukaan terhadap modernisasi (Nugraha, 2022).

### KESIMPULAN

Upaya pemerintah Kerajaan Arab Saudi dalam membuat perubahan dan reformasi setiap sektor menunjukkan wajah baru negara yang dulunya dikenal sebagai negara yang tertutup. Pada akhirnya industri hiburan dalam Saudi Vision 2030 merubah banyak sektor dengan sebagai bagian alat pendukung program tersebut. Sistem sosial, kebudayaan, dan pendidikan menjadi salah satu faktor yang mengalami perubahan sebagai bagian mengikuti reformasi Arab Saudi. Hasilnya posisi Ulama Wahabi dalam struktur pemerintahan semakin mengecil dan dilakukan secara radikal.

Keputusan tersebut dipilih agar tidak terjadi protes dan ikut campur Ulama Wahabi dalam merespon Saudi Vision 2030. Ditambah program Saudi Vision 2030 dianggap bertentangan dengan ajaran ulama wahabi karena terkait industri hiburan dan pariwisata. Artinya, meredam pengaruh ulama wahabi menjadi senjata utama keberhasilan program tersebut, dari menghilangkan perannya di pada proses kebijakan sampai penangkapan jika ada yang tidak setuju dengan Kerajaan Arab Saudi. Dampak dari penangkapan tersebut adalah menghilangkan ajaran Wahabi dalam kerajaan dan sistem sosial, kemudian konflik antar keluarga kerajaan, dan kehilangan kepercayaan dari negara Islam dan Timur Tengah.

### REFERENSI

Adriansah, A. (2021). *Peran Politik Muhammad Bin Salman Menuju Visi 2030 Arab Saudi*. Universitas Islam Negeri Jakarta.

- Akbar, F., & Rasyidah, R. (2024). Saudi Vision 2030: Upaya Nation Branding Arab Saudi via Saudi Pro League 2019-2023. *Global and Policy Journal of International Relations*, 12(01), 16–31. <https://doi.org/10.33005/jgp.v12i01.4303>
- Alexander, Y. (2023). *Opini: Tentang Wahabisme, Digusur di Saudi Arabia, Tumbuh di Indonesia*. Senayan Post.
- Alhussein, E. (2022). Saudi Arabia's nation-branding strategy. *The Arab Gulf States Institute in Washington*, 1, 1–16.
- Ali, M., & Rofi, M. S. (2021). Arah Kebijakan Militer Arab Saudi di Bawah Komando Mohammed Bin Salman ( MBS ) Menghadapi Visi Saudi 2030. *Jurnal Middle East and Islamic Studies*, 8(2). <https://doi.org/10.7454/meis.v8i2.137>
- Alsayad, A. S. (2017). The social dimensions of Saudi Vision 2030: a paradigm shift. *Center Intenational Policy For Inclusive Growth*, 70076.
- Anwar, H. (2016). Politik Luar Negeri Arab Saudi dan Ajaran Salafi-Wahabi di Indonesia. *The Journal of Islamic Studies and International Studies*, 1(1).
- Ardena, A. S. (2024). *Pengaruh Arab Vision 2030 Terhadap Hak - Hak Perempuan Di Arab Saudi Dalam Bidang Pendidikan Dan Ekonomi Periode 2017-2022*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Creswell, J. W. (2007). *Qualitative Inquiry Research Design Chosing Among Five Approach*. Sage Publication.
- Derajat, A. Z., & Kurniawan, T. (2021). Saudi Vision 2030 dan Kebijakan Reformasi Pada Kerajaan Arab Saudi. *Global and Policy Journal of International Relations*, 9(1), 39–50. <https://doi.org/10.33005/jgp.v9i1.2465>
- Folet, S. (2025). To See the Kingdom Through a New Lens: Vision 2030 and the Saudi Film Industry. *Middle East Journal of Culture and Communication*, 17(4), 316–336.
- Haryadi, P. (2018). Peran Muhammad bin Salman terhadap Perubahan Pilar Kenegaraan Arab Saudi. *Jurnal ICMES*, 2(1), 25–47. <https://doi.org/10.35748/jurnalicmes.v2i1.16>
- Hasanov, F. J., & Shannak, S. (2020). Electricity incentives for agriculture in Saudi Arabia. Is that relevant to remove them? *Energy*

- Policy*, 144(May), 111589.  
<https://doi.org/10.1016/j.enpol.2020.111589>
- Hidayat, N. A., Mahmudi, Y., & Soekarba, S. R. (2022). VISION 2030: Saudi Arabia's Modernization. *CMES: Jurnal Studi Timur Tengah*, XV(2), 137–148.
- Hikmah, C. N., & Abrar. (2019). Saudi Vision : Reformasi Ekonomi Arab Saudi. *Sejarah Dan Pendidikan Sejarah*, 1(1), 27–39.
- Huyette, S. S. (2019). Political Change in Sa'udi Arabia. *Political Adaptation in Sa'udi Arabia*, 1–10.  
<https://doi.org/10.4324/9780429302008-1>
- Ismail, R. (2023). *Saudi Salafi clerics under MBS: Reform and survival*.
- Kinnimont, J. (2017). Vision 2030 and Saudi Arabia's Social Contract. Austerity and Transformation. *Policy Commons*, July, 1–40.
- Latifah, A., & Solihat, A. (2024). Power relation and knowledge : linking Islamic education to socio-political reform in Saudi Arabia. *Jurnal Atarbiyah*, 9(2), 157–172.  
<https://doi.org/10.18326/attarbiyah.v9i2.157-172>
- Mas'udi. (2020). Wahhabisme vis-à-vis Reformasi Arab Saudi: MBS, Agensi, Moderasi, dan Diversifikasi Ekonomi. *Media Neliti.Com*, 3, 52–76.
- McKinsey & Company. (2015). *Saudi Arabia Beyond Oil: The Investment and Productivity Transformation*.
- Moshashai, D., Leber, A. M., & Savage, J. D. (2018). Saudi Arabia plans for its economic future : Vision 2030 , the National Transformation Plan and Saudi fiscal reform. *British Journal of Middle Eastern Studies*, 00(00), 1–21.  
<https://doi.org/10.1080/13530194.2018.1500269>
- Nugraha, M. (2022). Ancaman Kegagalan Demokratisasi di Indonesia : Identifikasi Hambatan dan Tantangan di era Reformasi. *JPPol: Jurnal Poros Politik*, 4(3), 1–6.  
<http://jurnal.unimor.ac.id/JPP/article/view/3460>
- Pinter Politik. (2023). *Politik MBS di Balik Kepindahan Ronaldo*. Pinter Politik.
- Saeed Al-Amri, F. (2024). Transformasi Digital Guna Menangkal Cyber Crime Dalam Rangka Optimalisasi Keamanan Nasional Negara Arab Saudi. *Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*.
- Safira, P. (2024). *Implementasi Program Saudi Vision 2030 Sebagai Langkah Modernisasi Arab Saudi Era Mohammed Bin Salman (2016-2024)*. Faculty of Economics & Politics.
- Stenslie, S. (2018). The end of elite unity and the stability of Saudi Arabia. *Washington Quarterly*, 41(1), 61–82.  
<https://doi.org/10.1080/0163660X.2018.1445360>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Vallier, K. (2017). Three Concepts of Political Stability: an Agent- Based Model. In *Social Philosophy and Policy*.
- Voa Indonesia. (2016). *Ulama Saudi Dukung Larangan Perempuan Mengemudi*. VOA INDONESIA.
- Wafi, M. H. (2018). Diskursus Reformasi Arab Saudi: Kontestasi Kerajaan Saudi Dan Wahabi. *Journal of Islamic World and Politics*, 2(1).  
<https://doi.org/10.18196/jiwp.2113>
- Yunai, M. H. (2022). Pendidikan Arab Saudi: Tantangan dan Reformasi. *Akademika: Jurnal Keagamaan Dan Pendidikan*, 18(1), 37–44.
- Zulifan, M. (2024). Moderasi Islam, Salafisme, dan Reformasi Kerajaan Arab Saudi oleh Muhammad bin Salman (MBS). *Nady Al-Adab: Jurnal Bahasa Arab*, 21(2), 111–122.